

ABSTRAK

Studi ini berbicara tentang wacana demokrasi para aktivis—terutama dalam merespons wacana Orde Baru dan dalam mengembangkan wacana demokrasi yang ideal. Pembicaraan studi ini lebih ditekankan pada pilar-pilar sentral wacana Orde Baru: demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, dan persatuan nasional. Permasalahan dan tujuan utama studi ini didasarkan pada adanya keinginan untuk memahami respons para aktivis terhadap wacana Orde Baru pada tema-tema utama tersebut serta memahami wacana demokrasi yang mereka idealkan.

Studi ini termasuk dalam studi kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang menjadi setting studi adalah salah satu kelompok aktivis rakyat yang berada di kota Surabaya yang menamakan kelompoknya "Arek-Arek Suroboyo Pro-Reformasi" (ASPR). Data dikoleksi dengan menggunakan tiga macam teknik koleksi data: dokumentasi (studi pustaka), observasi partisipatif, dan wawancara mendalam. Dalam menentukan jumlah subjek yang diwawancarai, studi ini menggunakan teknik "bola salju". Dengan demikian, jumlah subjek ditentukan berdasarkan kecukupan atau kejenuhan data dan tidak berdasarkan banyaknya subjek.

Untuk keperluan analisis data, digunakan beberapa konsep yang relevan dengan studi: wacana, demokrasi, wacana demokrasi, hubungan negara dengan masyarakat, serta teori-teori yang relevan yaitu teori ideologi: hegemoni Gramsci serta konsep kekuasaan/pengetahuan Foucault dan teori perlawanan. Teori-teori ini terutama digunakan untuk menjelaskan fenomena yang ditemukan dalam studi ini serta menempatkan hubungan-hubungan di antara wacana Orde Baru dan wacana para aktivis.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa ASPR menolak wacana Orde Baru secara tegas dan mendalam pada semua komponen utama—demokrasi Pancasila, dwifungsi ABRI, persatuan nasional. Hanya pada dua komponen bagian saja yang tidak terlihat adanya penolakan itu—yaitu dalam hal kedudukan ABRI di MPR yang diterima secara superficial dan bentuk negara kesatuan yang tidak diterima dan tidak ditolak. Penolakan itu selain terwujud dalam segala aktivitas ASPR: aksi demonstrasi yang dilakukan untuk menuntut ditegakkannya demokrasi dan hak asasi manusia, juga tersirat dalam bahasa yang mereka gunakan yang tergocong dalam wacana kontrahegemoni sebagai respons terhadap wacana hegemoni Orde Baru. Hal itu terlihat dari kosakata dan pernyataan mereka yang bertolak belakang dengan kosakata dan pernyataan yang digunakan Orde Baru.

Adapun wacana demokrasi yang diidealkan oleh ASPR adalah demokrasi yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang sesungguhnya, yaitu adanya keterlibatan rakyat dalam proses politik. Untuk itu, dwifungsi ABRI harus dicabut: tidak ada lagi campur tangan ABRI dalam bidang sosial politik. Dalam membina persatuan nasional dan tegaknya demokrasi, haruslah diutamakan adanya keadilan dan pemerataan. Isu-isu semacam seperti 'disintegrasi bangsa', 'SARA', 'komunis dan Islam radikal' tidak perlu lagi dibesar-besarkan. Yang lebih diperlukan dalam hal ini adalah adanya pendidikan (terutama pendidikan politik) bagi rakyat—hal seperti ini sudah dilakukan ASPR dengan membentuk 'sekolah rakyat'—agar mereka tidak mudah terpengaruh oleh hasutan yang sengaja mengadu domba rakyat yang berdampak pada persatuan nasional.
